

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENAHANAN
YANG TIDAK SAH
SKRIPSI**



OLEH :
MAHQUMMIDA TYAS RAMADHANI
22300094

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENAHANAN YANG
TIDAK SAH
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA
SURABAYA



OLEH :

MAHQUMMIDA TYAS RAMADHANI

22300094

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**UPAYA HUKUM TERHADAP PENAHANAN YANG
TIDAK SAH
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUSMA
SURABAYA



OLEH :

MAHQUMMIDA TYAS RAMADHANI

22300094

SURABAYA, 6 NOVEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. Edi krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv.

PEMBIMBING

Septiana Prameswari, S.H., M.H.

UPAYA HUKUM TERHADAP PENAHANAN YANG TIDAK SAH

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

MAHQUMMIDA TYAS RAMADHANI

NPM 22300094

TELAH DIPERTAHANKAN

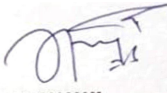
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 6 NOVEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

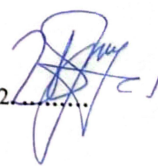
1. Nur khalimatus sa'diyah, S.H.,M.H. CMC

(KETUA)

1.


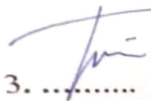
2. Dr. Umi Enggarsasi , S.H.,M.Hum

(ANGGOTA)

2.


3. Septiana Prameswari, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dengan judul “*Upaya Hukum terhadap Penahanan yang Tidak Sah*”. Penulisan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akademik serta sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman mengenai pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

Dalam penyusunan karya ini, penulis berusaha mengkaji secara mendalam mengenai konsep penahanan, batas-batas kewenangan aparat penegak hukum, serta bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang apabila mengalami penahanan yang tidak sah. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta doa selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Secara khusus, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahni Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.

2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh Pendidikan.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., MKn.CCD., selaku kepala program studi S1 hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah yang telah memberikan arahan, dukungan, serta fasilitas selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kebijakan dan bimbingan yang telah mempermudah penulis dalam menyelesaikan studi di Program Studi hukum
4. Ibu Dr. Masitha Tismananda Kumala, S.H., M.H., selaku Dosen Wali, atas perhatian, motivasi, dan bimbingannya selama penulis menempuh studi.
5. Ibu Septiana Prameswari, S.H., M.H., CMC., selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga kepada penulis dalam menyusun karya ilmiah ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses perkuliahan.
7. penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ibu sulikah dan Ayah Hariono, sosok yang selalu menjadi cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, kesabaran, dan doa yang tidak pernah terputus. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sepenuhnya

didedikasikan untuk Ibu tercinta, sebagai wujud rasa terima kasih dan cinta yang mendalam atas segala doa dan dukungan yang tak pernah berhenti.

8. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada A. Fahris Rianto, yang telah memberikan dukungan , semangat, serta doa yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengertian, perhatian, dan motivasi yang selalu diberikan di setiap tahap perjuangan penulis dalam menyelesaikan studi.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Melanis eka Pratiwi, dhiah ayu awp, Aisyah putri sunadi, Idelia Syahla, Sellsa Vira A, Adinda Shofi, yang mana sudah menjadi teman seperjuangan skripsi, yang telah menjadi rekan diskusi, berbagi pengetahuan, serta saling menyemangati di tengah proses yang penuh perjuangan. Kehadiran kalian semua telah memberikan arti tersendiri dalam perjalanan akademik penulis.

Hormat Saya

PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahqummida Tyas Ramadhani

NPM : 22300094

Program Studi : hukum

No. Telp. (HP) : 085236494827

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**UPAYA HUKUM TERHADAP PENAHANAN YANG TIDAK SAH**" adalah karya asli saya yang tidak mengandung unsur plagiat dan belum pernah dipublikasikan di manapun dalam bentuk apapun.

Dengan ini, saya menandatangani surat pernyataan ini secara jujur tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jika di masa depan saya terbukti memberikan informasi yang tidak benar atau ada pihak yang mengklaim bahwa skripsi saya adalah karya milik orang lain atau lembaga tertentu, saya siap menghadapi proses hukum baik pidana maupun perdata.

Surabaya, 8 oktober 2025

Yang menyatakan



Mahqummida Tyas R

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Upaya hukum terhadap penahanan tidak sah” membahas mengenai penahanan sebagai upaya paksa yang sangat membatasi kebebasan individu sehingga harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai KUHAP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penahanan menurut KUHAP serta mengkaji bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi penahanan yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer berupa KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983, dan PP No. 58 Tahun 2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penahanan hanya dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat formil berupa surat perintah penahanan yang sah dan syarat materiil berupa adanya bukti permulaan yang cukup serta alasan objektif penahanan. Penahanan yang tidak memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut dapat dinyatakan tidak sah melalui mekanisme praperadilan. Upaya hukum yang tersedia bagi korban penahanan tidak sah mencakup praperadilan, permohonan ganti kerugian, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Kata Kunci: Penahanan, Praperadilan, Upaya Hukum, Penahanan Tidak Sah, KUHAP.

ABSTRACT

This research, titled “Legal Remedies Against Unlawful Detention,” discusses detention as a coercive measure that severely restricts individual freedom and therefore must meet formal and material requirements in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP). The study aims to analyze the authority of detention under the KUHAP and to examine the forms of legal remedies that can be pursued in the event of unlawful detention.

This research uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, with primary legal materials consisting of the KUHAP, Government Regulation No. 27 of 1983, and Government Regulation No. 58 of 2010.

Research results show that the authority to detain is only held by investigators, public prosecutors, and judges, and can only be carried out if the formal requirement of a valid detention order and the material requirement of sufficient preliminary evidence and an objective reason for detention are met. Detention that does not meet either of these requirements can be declared invalid through a pretrial mechanism. Legal remedies available for victims of unlawful detention include pretrial proceedings, claims for compensation, and rehabilitation as regulated in the Criminal Procedure Code.

Keywords: Detention, Pretrial, Legal Remedies, Unlawful Detention, Criminal Procedure Code

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	<i>vii</i>
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat penelitian.....	7
5. Kerangka konseptual.....	8
6. Metode penelitian.....	12
7. Pertanggungjawaban sistematika	15
BAB II KEWENANGAN PENAHANAN YANG DIATUR DALAM KUHAP 18	
2.1 Syarat Sah Nya Penahanan	20
2.2 Kewenangan Penahanan Berdasarkan Kuhap.....	31
1. Kewenangan Penahanan Oleh Penyidik.....	32
2. Kewenangan Penahanan Oleh Penuntut Umum.....	37
3. Kewenangan Penahanan Oleh Hakim	40
BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP PENAHANAN YANG TIDAK SAH 44	
3.1 Upaya Praperadilan	44
3.2 Tuntutan Ganti Rugi.....	55
3.3 Rehabilitasi atau Pemulihan Hak	61
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR BACAAN	